

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP) DI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO (STUDI KASUS DIALOG PUBLIK)

**Achmad Irgi Riza Artandi**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
Achmadirgi4@gmail.com

**Indah Prabawati, S.Sos., M.Si.**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
prabawatiindah@yahoo.com

### Abstrak

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam kebijakan *Open Government Partnership* memiliki inovasi program dialog publik. Gambaran umum dialog publik yaitu diawali penjelasan seputar isu terkini yang disampaikan oleh OPD terkait, kemudian dilanjut dengan penyampaian ide gagasan maupun kritikan dari masyarakat. Program dialog publik terdapat masalah terkait partisipasi masyarakat menurun. Tujuan Penelitian untuk menggambarkan partisipasi Masyarakat dalam kebijakan *Open Government Partnership* (OGP) pada Dialog Publik di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian yang terdiri dari partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, Partisipasi dalam pengambilan manfaat, partisipasi dalam evaluasi. Teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, antara lain pengumpulan data, reduksi data atau pengolahan data, penyajian data serta pemaparan dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis tentang partisipasi dalam pengambilan keputusan masyarakat sebagai peserta dialog publik telah berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan dialog. Partisipasi dalam pelaksanaan masyarakat menyampaikan gagasan ide kritikan kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Partisipasi masyarakat terhadap dialog publik selama ini mengalami naik turun karena ada beberapa faktor. Pertama dikarenakan cuaca tidak menentu seperti hujan deras yang menyebabkan masyarakat hanya mendengarkan lewat radio. Kedua, aspirasi sifatnya kelompok golongan atau individu. Biasanya kalau kelompok datangnya bersamaan contoh dari paguyuban parkir Desa Ledok, disabilitas Bojonegoro. Partisipasi dalam pengambilan manfaat pertama, masyarakat lebih berani menyampaikan gagasan, ide maupun kritikan kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Kedua, ada keberanian Pemerintah menanggapi dengan baik dan cerdas. Ketiga, pemerintah bisa lebih mudah mendengar penyampaian gagasan ide maupun kritikan dari masyarakat. Partisipasi dalam evaluasi penyampaian evaluasi kepada masyarakat Dinas Kominfo dilaksanakan pada pertemuan Jumat berikutnya. Harapan disampaikan masyarakat berkali-kali siapapun yang akan melanjutkan pemimpin Kabupaten Bojonegoro agar tetap melanjutkan tradisi keterbukaan antara pejabat dengan rakyat melalui dialog publik. Adapun saran dari penelitian ini yaitu perlu adanya sosialisasi kembali terhadap pentingnya dialog publik terhadap masyarakat. Tanggapan ataupun jawaban yang diberikan oleh OPD terkait tindak lanjut pada dialog publik harus terdapat kepastian agar masyarakat yang memberikan gagasan, ide, maupun kritikan tidak disampaikan berulang-ulang pada pertemuan dialog publik yang mendatang. Kekhawatiran masyarakat terhadap dialog publik yaitu agar tetap diselenggarakan dan direncanakan, walaupun pada masa mendatang akan ada pergantian Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro

**Kata Kunci : Partisipasi masyarakat, Dialog publik**

### Abstract

Office of communications and Informatics in Bojonegoro Regency policy Open Government Partnership has a public dialog program innovation. An overview of the public dialogue that is preceded explanations regarding current issues presented by OPD are related, then dilanjut with the submission of the idea of the idea as well as criticism from people. The program of public dialog there is a problem regarding public participation is declining. Research objectives to describe the public participation in the policy of Open Government Partnership (OGP) on Public Dialogue in Bojonegoro regency Government. This type of research is descriptive research with qualitative approach. While the focus of the research consisted of participation in decision-making, participation in the implementation of, the participation in the taking of benefits, participation in the evaluation. Engineering data collection i.e., interview techniques, observation, and documentation that can be analyzed using techniques of data analysis according to Miles and Huberman, among others, data collection, data processing or data reduction, the presentation of data as well as

exposure and the withdrawal of the conclusion. The results of the analysis of the participation in decision-making of the community as a participant in the public dialogue has participated directly or indirectly in the decision-making dialogue. Participation in the implementation of the community delivered the idea the idea of criticism to the Government District Bojonegoro. Public participation against public dialogue over this experience up and down because there are a number of factors. First because of the uncertain weather as heavy rain which caused the community just listen by radio. Second, the aspirations of the group or individual nature. Usually when a group coming of concurrent instances of associations Ledok Village parking, disability Bojonegoro. Participation in the taking of the first benefits, more daring society conveys ideas, ideas or criticism to the Government District Bojonegoro. Second, there is the courage of the Government responding with good and smart. Third, the Government can more easily hear submission idea ideas or criticism from the community. Participation in the evaluation of the submission Evaluation Service to the community at a meeting held Friday Kominfo next. Hope community delivered many times anyone that County leaders will continue the Bojonegoro still continue the tradition of openness between officials with the people through public dialogue. As for the suggestion of the study i.e. need for socializing back against the importance of the public dialogue on the community. Responses or answers given by OPD related follow-up on public dialogue must be certainty so that communities that give you an idea, ideas, criticism or not delivered over and over again at the next meeting of the public dialogue. Community concerns against the public dialogue that is to keep organized and planned, even if in the future there will be a changing of the Regent and Vice Regent Kabupaten Bojonegoro

**Keywords: public participation, public Dialogue**

## PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Pemkab Bojonegoro) dapat dikatakan merupakan salah satu instansi pemerintahan yang terdepan di dalam menjalankan nilai-nilai *Open Government*. Dikatakan demikian dikarenakan secara transformatif, Pemkab Bojonegoro mampu menginstitusionalisasi nilai-nilai keterbukaan ke dalam proses kerja pemerintah. Dimulai dari pendekatan sendiri oleh Bupati dan Wakil Bupati, Pemkab Bojonegoro kemudian mengejawantahkan hal ini ke dalam pendekatan struktural hingga akhirnya bahkan mampu merubah budaya pemerintahan.

Kabupaten Bojonegoro terdapat beberapa pintu-pintu keterebukaan diantaranya *Open Data Contact*, Dialog Publik, SMS Radio, Blusukan, lapor. Dari beberapa pintu keterbukaan yang ada di kabupaten Bojonegoro program tersebut sebagai *Open Government Partnership*. Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada program Dialog Publik untuk meneliti lebih dalam. Alasan peneliti mengambil *Open Government Partnership* dengan fokus dialog publik di Kabupaten Bojonegoro dikarenakan, kebijakan dialog publik adalah pintu keterbukaan yang pertama dari lima pintu keterbukaan di Kabupaten Bojonegoro, dilaksanakan pada tahun 2008 untuk mendukung terlaksananya *Open Government Partnership*.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melaksanakan dialog publik sebagai wujud demokrasi dan transparansi Pemerintahan. Dialog publik dilaksanakan setelah pelantikan Bupati Suyoto dengan dasar hukum SK Bupati Bojonegoro Nomor 188/305/KEP/412.12/2008 tentang Dialog Publik antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan masyarakat Kabupaten Bojonegoro, pelaksanaan dialog publik mempunyai program agar kebijakan berjalan dengan efektif dan maksimal, budaya demokrasi dan transparansi melalui dialog publik dan Dinas Komunikasi dan Informatika ditunjuk oleh Bupati dalam teknis pelaksana dialog publik, masyarakat tidak hanya sekedar diberikan pengetahuan, pemahaman maupun penyuluhan tentang pentingnya layanan

pemerintah berupa informasi yang transparan, akan tetapi juga ditumbuhkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri tentang sisi positifnya atau keuntungan yang diperoleh ketika masyarakat memahami kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Dialog publik dilaksanakan pada setiap hari Jumat pukul 14.00 WIB bertempat di Pendopo Malowopati dengan sebagai penyelenggara Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro. Dengan peserta yang dihadiri oleh masyarakat umum Kabupaten Bojonegoro serta seluruh Kepala OPD Kabupaten Bojonegoro. Teknis penyelenggaraan dialog publik dengan penyampaian paparan kinerja OPD, penyampaian kritik/saran/masukan dari masyarakat, tanggapan OPD terkait untuk menjawab yang disampaikan masyarakat, di akhir sesi Bupati Kabupaten Bojonegoro akan menyimpulkan beberapa pertanyaan maupun jawaban yang sudah diutarakan. Jika bupati berhalangan hadir di wakil kan oleh Wakil Bupati ataupun Sekda, kalau memang tidak bisa itupun bukan menjadi masalah.

Gambaran umum dari kebijakan dialog publik di Kabupaten Bojonegoro, dialog publik yang di selenggarakan pada setiap hari jumat pada pukul 14.00 WIB, mampu menarik masyarakat untuk hadir dalam acara tersebut dengan mengutarakan keluh kesah yang dihadapi. Pada forum ini memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seperti yang dimuat pada berita berikut:

Pelaksanaan dialog publik antara pemerintah dengan masyarakat mempunyai program agar kebijakan berjalan dengan efektif dan maksimal, budaya demokrasi dan transparansi yang ada di Kabupaten Bojonegoro melalui dialog publik dan Dinas Komunikasi dan Informatika ditunjuk oleh Bupati dalam teknis pelaksana dialog publik, sedangkan tugas yang dijalankan Dinas Kominfo tidak semata sebagai *event organizer*, namun terdapat tugas lain yang mendesak jika dikaitkan dengan kebermanfaatannya yang dirasakan oleh masyarakat. Pada pelaksanaan dialog publik sangat diharapkan

partisipasi masyarakat agar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bisa memperbaiki kelemahan sistem Pemerintahan melalui masalah yang diutarakan masyarakat. Oleh karena itu, jika tidak ada partisipasi dari masyarakat tentu dialog publik tidak akan terselenggara dengan efektif.

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penentu sekaligus sebagai indikator keberhasilan suatu kebijakan. Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan. Dalam penelitian Kogaya, dkk (2015:45) dikatakan bahwa konsep pembangunan dengan pendekatan partisipasi masyarakat dapat memberikan beberapa keuntungan salah satunya adalah peranan pemerintah atau organisasi non pemerintah hanya sebagai fasilitator, sedangkan inisiatif berasal dari masyarakat.

Huraerah (Arzaq 2015:14) mengatakan bahwa:

partisipasi masyarakat bukan sekedar mengambil bagian atau pengikutsertaan saja, tetapi lebih dari itu dalam pengertian tersebut terkandung tiga gagasan pokok didalamnya, yaitu *mental end emotional involvement* (keterlibatan untuk emosi), *motivation to contribute* (dorongan untuk memberikan sumbangan), dan *acceptance of responsibility* (penerimaan tanggung jawab).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan partisipasi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam suatu kebijakan sangat dibutuhkan. Dalam hal ini pada dialog publik di Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro akhir-akhir ini mengalami penurunan partisipasi masyarakat seperti yang dikatakan masyarakat kepada Dinas Kominfo Bojonegoro yaitu terdapat masyarakat yang menayakan partisipasi masyarakat dalam dialog publik.

Salah satu bukti keluhan masyarakat yang mengetahui bahwa dialog publik di akhir-akhir ini mengalami penurunan.

“Terkait pelaksanaan Dialog Publik para peserta dialog tiap hari pesertanya terus menurun ini dikarenakan apa permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Bojonegoro apa sudah tidak ada (Puas) ? Maka perlu kita evaluasi kembali dan mohon ditindak lanjuti ? (Dialog Interaktif)  
(<https://www.lapor.go.id/pengaduan>)

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Hadir Peserta Dialog Publik**

| No                         | Keterangan                 | Jumlah Peserta |
|----------------------------|----------------------------|----------------|
| 1                          | ➤ Jum'at Pertama           | 148            |
|                            | ➤ Jum'at Kedua             | 130            |
|                            | ➤ Jum'at Ketiga            | 129            |
|                            | ➤ Jum'at Keempat           | 116            |
|                            | Jumlah Bulan Oktober 2017  | 523            |
| 2                          | ➤ Jum'at Pertama           | 135            |
|                            | ➤ Jum'at Kedua             | -              |
|                            | ➤ Jum'at Ketiga            | 134            |
|                            | ➤ Jum'at Keempat           | 116            |
|                            | ➤ Jum'at Kelima            | -              |
| Jumlah Bulan November 2017 | 385                        |                |
| 3                          | ➤ Jum'at Pertama           | 132            |
|                            | ➤ Jum'at Kedua             | 124            |
|                            | ➤ Jum'at Ketiga            | 114            |
|                            | ➤ Jum'at Keempat           | 111            |
|                            | Jumlah Bulan Desember 2017 | 481            |

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017

Sedangkan menurut Bapak Mat Nur S,Sos Selaku Kasi Layanan Informasi Publik menambahkan :

“ Dialog publik merupakan statement dan kontrak politik dari Bapak Bupati Suyoto kepada masyarakat dan yang akan terus dilaksanakan sampai tidak ada satupun yang hadir dalam dialog publik di pendopo malowopati Bojonegoro. Dengan menurunnya partisipasi masyarakat pada dialog publik ini masyarakat sudah mulai puas apa yang telah dilakukan pemerintah kabupaten bojonegoro dengan perbaikan melalui dialog publik yang sudah terselenggar hampir sepuluh tahun terakhir”.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang *Open Government Partnership* (OGP) di Kabupaten Bojonegoro dengan fokus dialog publik yang telah diungkapkan diatas dan begitu pentingnya partisipasi dalam kebijakan tersebut maka peneliti tertarik untuk melihat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai Kota/Kabupaten Percontohan *Open Government Partnership*. Maka dalam penelitian ini mengambil judul: **“Partisipasi Masyarakat terhadap Open Government Partnership (OGP) studi kasus Dialog Publik di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro”**

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian menggunakan teori membedakan partisipasi Cohen dan Uphoff (2011:23) partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam manfaat, partisipasi dalam evaluasi, dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian partisipasi masyarakat dalam *open government partnership* di pemerintah kabupaten Bojonegoro studi kasus dialog publik. wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman (dalam Usman, 2009) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat dilakukan pembahasan partisipasi masyarakat dalam *open government partnership* di pemerintah kabupaten Bojonegoro studi kasus dialog publik dengan menggunakan teori membedakan partisipasi yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Astute (2011:23) partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam manfaat, partisipasi dalam evaluasi. Dan berikut ini penjelasannya:

### 1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, Staff Dinas Kominfo maupun Kepala OPD, masyarakat sebagai peserta dialog publik telah berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan dialog publik seperti menyampaikan pendapat, argumen, kritikan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah, (2010:38) Partisipasi langsung terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapan.

Dalam kegiatan dialog publik masyarakat yang hadir tidak hanya diam saja dalam pelaksanaan rapat, mereka memberikan pendapat, gagasan, ide dan kritikan. Salah satu masyarakat peserta dialog publik mengaku bahwa setiap mereka berpendapat selalu ada respon maupun tindakan nyata dari OPD terkait untuk perkembangan, kesejahteraan, pembangunan Kabupaten Bojonegoro kearah yang jauh lebih baik. Menurut masyarakat sebelum adanya dialog publik, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro lebih tertutup bukan hanya itu masyarakat untuk masuk kedalam Pendopo Malowopati kesulitan karena harus laporan pemeriksaan oleh petugas yang jaga,

setelah dialog publik berjalan masyarakat dengan mudah keluar masuk area Pemkab Bojonegoro. Masyarakat juga dengan mudah ketemu Bupati maupun Kepala OPD untuk menyampaikan gagasan, ide, kritikan bagi kinerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Adapun kendala dalam pengambilan keputusan jika OPD terkait tidak bisa datang akan tetapi di buat peraturan kalau dialog publik Kepala Dinas harus datang kecuali kalau Kepala Dinas ada halangan atau tugas luar harus ada yang menggantikan yaitu Kabid atau Sekretarisnya pasti tidak pernah kita kosong meskipun bukan Kepala Dinas ada minimal Kasi. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak M.Fauzi Kasi pelayanan publik jika OPD terkait tidak hadir akan ada solusinya dengan. Penyelesaian masalah jika OPD terkait tidak ada pada dialog publik maka Dinas Kominfo kominfo akan mencatat pertanyaannya nanti dari pertanyaan tersebut akan kirim surat untuk diserahkan ke OPD bersangkutan untuk dijawab dalam bentuk tulisan juga, setelah itu jawaban tersebut Dinas Kominfo membacakan pada dialog publik yang akan datang.

### 2. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Dialog publik merupakan program yang dioperasikan oleh Dinas Kominfo Bojonegoro, berlangsung secara rutin sejak tahun 2008, tepatnya pada 14 Maret yakni dua hari setelah Suyoto dilantik menjadi Bupati di Kabupaten Bojonegoro. Berbeda dengan dialog-dialog yang biasa digelar oleh instansi pemerintahan di daerah lain, Dialog Publik di Bojonegoro bersifat terbuka. Semua lapisan masyarakat bisa datang tanpa prosedur protokoler yang biasa diberlakukan, mereka dapat menggunakan pakaian apapun, demokrasi Bojonegoro bersandal jepit, bercelana pendek, memakai sarung.

Sumber dana yang diperoleh untuk kegiatan dialog publik dari dana APBD Kabupaten Bojonegoro yang sudah dirancang atau dianggarkan setiap tahunnya. Akan tetapi peneliti kurang menggali lebih lanjut informasi tentang alokasi dana untuk program dialog publik setiap tahunnya. Dalam anggaran yang terlihat bahwa setiap kegiatan berlangsung terdapat komsumsi untuk masyarakat, OPD, serta pejabat Pemerintah yang lain, bukan hanya di gunakan untuk konsumsi anggaran tersebut juga untuk pembuatan laporan setelah kegiatan selesai.

Kordinasi untuk penyampaian progress setiap kinerja setiap OPD di dialog publik, yaitu OPD dikasih kesempatan memaparkan atau menjadi narasumber pada dialog publik sebanyak 3 sampai 4 kali dalam kurun waktu satu tahun pembagian dilakukan oleh Dinas

Kominfo. Jika OPD tidak menjadi narasumber tetap diwajibkan hadir pada dialog publik untuk menunggu pertanyaan dari masyarakat. Jadi, OPD hadir untuk melayani gagasan ide maupun kritikan dari masyarakat.

### 3. Partisipasi dalam manfaat

Dalam program dialog publik dikatakan mampu meningkatkan demokrasi dan transparansi di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Menurut Mardikanto dan Soebianto, (2012:81) partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Keberhasilan dialog publik dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberanian masyarakat dapat dilihat dari output yang dihasilkan, yang berupa Output yang di dapat setelah dialog publik dilaksanakan. Pertama, masyarakat lebih berani menyampaikan gagasan, ide maupun kritikan kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro secara terbuka dan tidak tertutup. Kedua, karena ada keberanian Pemerintah tanggap dengan baik cerdas karena ini tentunya tidak menyangkut jawab menjawab aja tapi tentunya ada narasumber. Ketiga, pemerintah bisa lebih mudah mendengar penyampai gagasan ide maupun kritikan dari masyarakat.

Berdasarkan wawancara kepada Kepala Dinas Pendidikan, salah satu dampak keberhasilan program dialog publik pada perubahan Kabupaten Bojonegoro, dampak keberhasilan dialog publik contoh dari bidang pendidikan ada masyarakat yang melaporkan guru yang tidak disiplin kepada Dinas Pendidikan lewat dialog publik laporan tersebut sangat bermanfaat sebagai bahan evaluasi, tentu itu sebagai dampak yang baik bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

Keberhasilan partisipasi masyarakat, dapat dilihat dari adanya mekanisme yang menyediakan akses bagi seluruh warga untuk terlibat atau memastikan bahwa mereka akan memperoleh manfaat (langsung maupun tidak langsung) setelah berpartisipasi. Najib dalam Huraerah (2011: 121-122). Demikian dalam halnya masyarakat merasa puas dan terbantu dengan adanya dialog publik. Hal tersebut disampaikan masyarakat nilai keberhasilan untuk dialog publik selama program berjalan sangatlah berhasil untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun memperbaiki pemerintahan. Laporan dari masyarakat bawah yang tentu pemerintah tidak tahu akan dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan kebijakan kedepan lewat dialog publik.

### 4. Partisipasi dalam Evaluasi

Menurut hasil wawancara evaluasi dilakukan dengan Bupati setiap jumat pagi itu juga evaluasi tentang dialog publik termasuk saluran lain (radio malowopati, PPID, SMS Bupati) setelah itu setiap tahun akan diketahui apa yang di mau masyarakat, apa kritikan masyarakat, akan diketahui. Contoh infrastruktur berupa persen, keamanan berupa persen, Pendidikan berupa persen dll. Ini semua tentunya akan menjadi kebijakan sendiri Pemkab Bojonegoro sebagai bahan yang akan datang. Penyampaian evaluasi kepada masyarakat Dinas Kominfo menyampaikan kembali evaluasi dialog publik yang diselenggarakan setiap jumat. sehingga pada jumat selanjutnya masyarakat akan mengevaluasi tentang apa yang sudah dilakukan OPD terhadap kegiatan dialog publik sebelumnya apakah sudah dilaksanakan apa belum, kalau belum masyarakat akan menyampaikan kembali. Bahkan pertanyaan yang sama bisa berlangsung sampai 2-3 kali berturut turut kalau masih belum selesai Bapak Bupati akan langsung menjawab pertanyaan tersebut.

Sedangkan hasil wawancara yang lain harapan dialog publik kedepan dari masyarakat tetap dilaksanakan. Seperti yang di utarakan Bapak Tamyis harapan disampaikan berkali-kali siapapun yang akan melanjutkan pemimpin Kabupaten Bojonegoro agar tetap melanjutkan tradisi keterbukaan antara pejabat dengan rakyat melalui dialog publik.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan cukup optimal, hal tersebut dapat dilihat gagasan, ide, aspirasi maupun kritikan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan tidak secara langsung dilibatkan akan tetapi gagasan, ide, aspirasi, dan kritikan yang diutarakan masyarakat bahan pertimbangan pembuatan kebijakan. Jika terdapat masalah yang diutarakan oleh masyarakat pada waktu kegiatan itu juga akan di selesaikan dan dijawab secara langsung oleh OPD terkait maupun Bupati Kabupaten Bojonegoro. Kehadiran masyarakat pada dialog publik beragam terkadang ada yang hadir individu untuk menyampaikan masalah pribadi ataupun dari lingkungan, selain itu ada yang hadir dengan beberapa kelompok maupun golongan untuk menyampaikan aspirasi dari kelompok tersebut.

Partisipasi dalam pelaksanaan dialog publik, masyarakat tidak ditarif biaya untuk datang pada kegiatan tersebut, anggaran yang didapat dialog publik dari APBD Kabupaten Bojonegoro. Masyarakat sangat antusias pada saat kegiatan dialog publik menyampaikan gagasan ide maupun kritik terhadap

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Dalam pelaksanaannya dialog publik terdapat kendala, biasanya kendala yang didapat jika ada masyarakat yang menyampaikan gagasan ide maupun kritikan terhadap OPD terkait tetapi OPD tersebut tidak datang, akan tetapi kendala tersebut bisa teratasi dengan mengasihikan surat kepada OPD terkait. Tujuan dari dialog publik untuk mewujudkan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro yang terbuka.

Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat adanya program dialog publik ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro, hal tersebut dibuktikan dengan sebagian besar masyarakat Kabupaten Bojonegoro mengakui bahwa gagasan, ide, aspirasi, maupun kritikan mereka didengar oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Adanya program dialog publik telah memberikan manfaat bagi masyarakat maupun OPD yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Khususnya lebih mudah masyarakat untuk menyampaikan kritikan terhadap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan meningkatkan demokrasi. Ouput yang di dapat setelah dialog publik dilaksanakan. Pertama, masyarakat lebih berani dengan menyampaikan gagasan, ide maupun kritikan terhadap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro secara terbuka. Kedua, karena ada keberanian dari masyarakat Pemerintah tanggap dengan baik cerdas, tentunya tidak menyangkut jawab menjawab tapi terdapat narasumber. Ketiga, Pemerintah bisa lebih mudah mendengar penyampai gagasan ide dari masyarakat. Selain itu, nilai keberhasilan yang diperoleh pada dialog publik selama program berjalan sudah jelas Pemerintah lebih mudah memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai aspirasi data fakta maupun realita yang terjadi dilapangan.

Partisipasi dalam Evaluasi masyarakat pada dialog publik tidak dilibatkan karena Dinas Kominfo sebagai pelaksana kegiatan tersebut, hanya dilakukan oleh Dinas Kominfo dalam evaluasi program tersebut. Maka setiap evaluasi kekurangan program dialog publik hanya dari Dinas Kominfo sendiri lalu di sampaikan kepada masyarakat pada pertemuan berikutnya. Pada evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro masyarakat dilibatkan tidak secara langsung dengan menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan pada dialog publik untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

### Saran

Hasil penelitian dilapangan telah menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada *Open Government Partnership* (OGP) dipemerintahan Kabupaten Bojonegoro dengan studi kasus dialog publik cukup optimal.

1. Perlu adanya sosialisasi kembali terhadap pentingnya dialog publik terhadap masyarakat dan manfaat dialog publik pada pemerintahan

Kabupaten Bojonegoro karena dari hasil pembahasan peneliti partisipasi masyarakat sudah mulai menurun terhadap dialog publik. Tentu perlu adanya perhatian lebih bagi masyarakat dalam dialog publik untuk mewujudkan Pemerintahan terbuka bagi Kabupaten Bojonegoro.

2. Tanggapan ataupun jawaban yang diberikan oleh OPD terkait tindak lanjut pada dialog publik harus terdapat kepastian agar masyarakat yang memberikan gagasan, ide, maupun kritikan tidak disampaikan berulang-ulang pada pertemuan dialog publik yang mendatang.
3. Harapan masyarakat terhadap dialog publik agar tetap diselenggarakan dan direncanakan, walaupun pada masa mendatang akan ada pergantian Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro.

### Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya :

- a. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA
- b. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing
- c. Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP., MA. selaku dosen penguji
- d. M. Farid Ma'ruf S.Sos, M.AP . selaku dosen penguji serta telah membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis peneliti.
- e. Dan pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Fahrudin. 2011. *Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora
- Adiyoso, w. 2009. *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta:ITS:Press
- Dwi, Prabowo. 2010. *Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam UpayaMewujudkan Good Governance (Kajian Tiga Badan Publik : Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang)*. Vol.30. 2010 Jakarta: hlm 76
- Dunn, William N. 2003. *Analisis kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjamada University press
- Huraerah, Abu. 2011. *Pengorganisasian dan pengembangan Masyarakat*. Badung: Humaniora.
- Mardikanto, T dan Soebianto, P. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta.

- Retnowati, Endang. 2012. *Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen)*. Volume XVII No. 1 Tahun 2012.
- Retnowati, Endang. 2012. *Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen)*. Volume XVII No. 1 Tahun 2012.
- Rika, Neneng. 2016. *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Melaksanakan Dialog Publik Sebagai Wujud Demokrasi Dan Transparansi*. Vol. XVII No.1 Juni 2016 /ISSN 1979 – 9225
- Setiaman, Agus. 2013. *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintahan Kota Bandung kepada Warga Kota)*. Volume 1, No. 2, Desember 2013 hlm 196-205.
- Slamet, Y.1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Tjokromidjojo, Bintoro. 1995. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi.2007. *Teori dan praktek kebijakan publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis kebijakan publik*. Malang: Bayumedia Publishing
- Zainal.2012 *Kebijakan Publik*. Jakarta : salemba Humanika
- Zuriah, Nurul. 2006. *Metode penelitian sosial dan pendidikan teori-aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.